|  |  |
| --- | --- |
| Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)  [*www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id*](http://www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id/) | |
| **EFEKTIVITAS PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KUBU RAYA** | |
| **H. Jaurino, Nurul Tri Rezeki**  Universitas Panca Bhakti, Universitas Panca Bhakti [nurultrirezeki@gmail.com](mailto:nurultrirezeki@gmail.com)   |  |  | | --- | --- | | ARTIKEL INFO | ABSTRACT | | |
| *Article history:*  *Avaible online jurnal.akuntansi.upb.ac.id* | *This research was conducted at the Office of the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD), Kubu Raya Regency, West Kalimantan. research problems regarding the level of effectiveness, the level of PBB-P2 revenue contribution, the growth rate of PBB-P2 and PAD as well as the target and realization of Government PAD, the delivery system for SPPT PBB P2 to taxpayers, and the obstacles faced in efforts to increase PBB-P2 revenue in Kubu Raya Regency.The method used in this research is quantitative research methods. This research is a quantitative research with quantitative descriptive analysis techniques using the ratio of effectiveness and contribution. The data collection method used is the interview method and documentation method. The data studied were data on the target and realization of PBB-P2 revenue, data on the realization of local tax revenue and revenue from regional original revenue (PAD), and the results of interviews.The results showed that the level of effectiveness of PBB P2 revenue in 2013-2017 was quite effective with an average of 80.80%, the contribution rate of PBB P2 revenue to local tax results in 2013-2017 showed less results with an average value of 11.90 %, the contribution rate of PBB P2 revenue to Regional Original Revenue (PAD) in 2013-2017 shows very poor results with an average value of 2.01%. The obstacles to the Kubu Raya Government in optimizing PBB-P2 revenue are the lack of awareness from the public to pay PBB-P2, the existence of empty tax objects and subjects, and the far distance of taxpayers' places.*  ***Keywords****:* *Effectiveness, PBB-P2, Regional Original Income*. |
|  | **ABSTRAK**  Penelitian ini pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Deaerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. permasalahan penelitian mengenai tingkat efektivitas, tingkat kontribusi penerimaan PBB P2, laju pertumbuhan PBB P2 dan PAD serta target dan realisasi PAD Pemerintah, sistem penyampaian SPPT PBB P2 ke wajib pajak, dan kendala yang dihadapi dalam usaha peningkatan penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Data yang diteliti adalah data target dan realisasi penerimaan PBB P2, data realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan hasil dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 tahun 2013-2017 cukup efektif dengan rata-rata sebesar 80,80%, tingkat kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap hasil pajak daerah tahun 2013-2017 menunjukkan hasil kurang dengan nilai rata-rata sebesar 11,90%, tingkat kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2017 menunjukkan hasil sangat kurang dengan nilai rata-rata sebesar 2,01%. Kendala penghambatnya Pemerintah Kubu Raya dalam mengoptimalkan penerimaan PBB P2 yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB P2, adanya objek maupun subyek pajak yang kosong, dan jauhnya jangkauan tempat wajib pajak.  ***Kata Kunci:*** *Efektivitas, PBB-P2, Pendapatan Asli Daerah.* |

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara, pajak sebagai sumber pendapatan negara, hal ini penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sehingga dapat tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Melihat kebijakan fiskal ini khususnya dibidang perpajakan bisa membantu dalam menopang jalannya otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-Undang ini merupakan salah satu langkah pemerintah pusat dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan desentralisai fiskal dalam bidang perpajakan. Hal itu ditunjukkan dengan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Penerimaan PBB P2 adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Setiap tahunnya, Pemerintah Daerah memiliki target dalam penerimaan PBB P2. Walaupun terkadang target dan realisasinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya PBB-P2 maka perlu adanya strategi yang khusus untuk menggali potensi penerimaan PAD khususnya dari sektor PBB P2.

Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yang telah melakukan pengalihan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak tahun 2013. Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat. Tetapi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini sangatlah rendah dari pada penerimaan pajak darah lainnya padahal realisasi penerimaan masih banyak belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya menunjukan target penerimaan PBB-P2 dan realisasi pencapaiannya dari tahun 2013-2017.

**Tabel 1. Target dan Realisasi PBB-P2 Kab.Kubu Raya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Target  (Rp) | Realisasi  (Rp) |
| 2013 | 5.669.000.000,00 | 5.837.101.281,00 |
| 2014 | 7.062.099.731,92 | 7.986.573.904,00 |
| 2015 | 24.000.000.000,00 | 6.917.391.406,00 |
| 2016 | 18.000.000.000,00 | 10.301.551.829,00 |
| 2017 | 11.000.000.000,00 | 11.204.999.506,00 |

*Sumber: BPPRD Kabupaten Kubu raya*

Efektivitas merupakan hal yang menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang sudah direncanakan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka dapat dikatakan semakin tinggi nilai efektivitasnya. Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB P2, dapat dikatakan kinerja aparatur penegak pajak telah maksimal atau efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB P2 tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparatur penegak pajak kurang maksimal

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang, penulis menetapkan wilayah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan judul “**Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya”.**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2, tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2, laju pertumbuhan PBB-P2 dan PAD serta target dan realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya?
2. Bagaimana sistem penyampaian SPPT PBB P2 wajib pajak pada Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam usaha peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kubu Raya?

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini memiliki (tiga) tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2, tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2, laju pertumbuhan PBB-P2 dan PAD serta target dan realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya .
2. Untuk menganalisis sistem penyampaian SPPT PBB P2 wajib pajak pada Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam usaha peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kubu Raya**.**

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan di bidang akuntansi secara khusus dan pengalaman praktik peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama di bangku perkuliahan.

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dan memberikan wawasan serta wacana kepada seluruh Satuan Kerja Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Deaerah Kab. Kubu Raya dalam mengembangkan sumber daya, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan.

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menambah wawasan bagi para pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan khususnya di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Deaerah Kab. Kubu Raya.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana tercapainya tujuan yang ingin dicapai atau dikehendaki. Dalam suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga hal ini akan menjadi kerangka acuan yang akan digunakan pada saat proses proses pelaksanaan (Evi Suryani:2016).

**Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan Pendapatan asli daerah sebagai berikut : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

**Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

**METODE PENELITIAN**

***Desain penelitian***

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2013) menjelaskan penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

**Teknik Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

**Teknik Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah

Dengan mengukur efektivitas penerimaan PBB-P2, tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2, laju pertumbuhan PBB-P2 dan PAD serta target dan realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan cara sebagai berikut:

* + - 1. Melakukan analisis perbandingan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya melalui analisis efektivitas penerimaan dalam 5 (empat) tahun periode 2013-2017.
      2. Menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017.
      3. Menghitung dan menyusun tabel laju pertumbuhan PBB-P2 dan PAD Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017.
      4. Menganalisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017 dengan membandingkan kontribusi dan tingkat pertumbuhan PBB P2 Kubu Raya dan kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Kubu Raya.
      5. Melakukan analisis sistem penyampaian SPPT PBB-P2 ke wajib pajak dengan menggunakan flowchart. .
      6. Melakukan analisis kendala dan upaya BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dengan wawancara

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Efektivitas penerimaan PBB-P2 dalam 5 (lima) tahun periode 2013-2017**

Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

**Tabel 2. Efektivitas Penerimaan PBB-P2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target  (Rp) | Realisasi  (Rp) | Efektivitas  (%) | Kritria Efektivitas |
| 2013 | 5.669.000.000,00 | 5.837.101.281,00 | 102,96 | Sangat Efektif |
| 2014 | 7.062.099.731,92 | 7.986.573.904,00 | 113,09 | Sangat Efektif |
| 2015 | 24.000.000.000,00 | 6.917.391.406,00 | 28,82 | Tidak Efektif |
| 2016 | 18.000.000.000,00 | 10.301.551.829,00 | 57,23 | Tidak Efektif |
| 2017 | 11.000.000.000,00 | 11.204.999.506,00 | 101,86 | Sangat Efektif |
| Rata-rata | | | 80,80 | Cukup Efektif |

*Sumber : data olahan*

Berdasarkan dari hasil tersebut dapat diketahui rata-rata efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017 sebesar 80,80% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif.

***Analisis laju pertumbuhan PBB-P2 dan PAD Kabupaten Kubu Rata tahun 2013-2017***

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan PBB P2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi Penerimaan PBB-P2  (Rp) | Perubahan  (Rp) | Laju Pertumbuhan Per Tahun (%) |
| 2013 | 5.837.101.281,00 | - | - |
| 2014 | 7.986.573.904,00 | 2.149.472.623,00 | 36,82 |
| 2015 | 6.917.391.406,00 | ( 1.069.182.498,00 ) | (13,39) |
| 2016 | 10.301.551.829,00 | 3.384.160.423,00 | 48,92 |
| 2017 | 11.204.999.506,00 | 903.447.677,00 | 8,78 |
| Rata-rata | | | 20,28 |

*Sumber : data olahan*

Dari hasil tersebut bahwa dapat diperoleh rata-rata laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya selama periode 2013-2017 yaitu sebesar 20,28%.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi Penerimaan PAD  (Rp) | Perubahan  (Rp) | Laju Pertumbuhan Per Tahun (%) |
| 2013 | 954.287.220.660,27 | - | - |
| 2014 | 1.084.025.442.181,68 | 129.738.221.521,41 | 13,60 |
| 2015 | 1.178.405.347.668,82 | 94.379.905.478,14 | 8,71 |
| 2016 | 1.386.142.523.594,01 | 207.737.175.925,19 | 17,63 |
| 2017 | 152.025.458.465,61 | (1.234.117.065.128,40) | (89,03) |
| Rata-rata | | | (49,09) |

*Sumber : data olahan*

Dari hasil tersebut bahwa dapat diperoleh rata-rata laju pertumbuhan PAD Kabupaten Kubu Raya selama periode 2013-2017 yaitu sebesar -49,09%.

**Analisis PAD Kab.Kubu Raya tahun 2013-2017 dengan membandingkan kontribusi dan tingkat pertumbuhan PBB P2 Kubu Raya dan kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kab.Kubu Raya.**

**Tabel 5. Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Efektivitas  (%) | Kontribusi Terhadap Pajak Daerah  (%) | Kontribusi Terhadap PAD  (%) |
| 2013 | 102,96 | 12,12 | 0,61 |
| 2014 | 113,09 | 12,16 | 0,74 |
| 2015 | 28,82 | 12,60 | 0,59 |
| 2016 | 57,23 | 15,23 | 0,74 |
| 2017 | 101,86 | 9,86 | 7,38 |
| Rata-rata | 80,80 | 11,90 | 2,01 |

*Sumber : data olahan*

Dapat diketahui bahwa peningkatan maupun penurunan tingkat efektivitas PBB-P2 tidak bepengaruh terhadap kontribusi yang berikan terhadap pajak daerah maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu terbukti dari tahun 2014-2015, bahwa tahun 2014-2015 mengalami penurunan tingkat efektivitasnya, sedangkan untuk kontribusi terhadap pajak daerah mengalami kenaikan, dan lain halnya dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan.

**Analisis kendala dan upaya BPPRD Kab.Kubu Raya dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2**

Berdasarkan analisis bahwa kendala penghambatnya BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB-P2, adanya objek pajak yang kosong, dan jauhnya jangkauan tempat wajib pajak.

## PENUTUP

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi . Pada tahun 2013, 2014, dan 2017 masing-masing sebesar 102,96%, 113,09%, dan 101,86% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 28,82% dan 57,23% dengan kriteria nilai interpretasi tidak efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya pada periode tahun 2013-2017 sebesar 80,80% dengan kriteria nilai interpretasi cukup efektif.
2. Kontribusi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya dalam lima tahun periode mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya terhadap hasil Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar 11,90% dengan kriteria nilai interpretasi kurang. Sedangkan rata-rata kontribusi PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya sebesar 2,01% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.
3. Laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya mengalami fluktuasi dalam 5 tahun periode 2013-2017. Realisasi Rata-rata laju pertumbuhan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya selama periode 2013-2017 yaitu sebesar 20,28%. Sedangkan dari realisasi rata-rata laju pertumbuhan PAD Kabupaten Kubu Raya selama periode 2013-2017 yaitu sebesar -49,09% dari realisasi rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Kubu Raya.
4. Alur penyampaian SPPT PBB P2 ke wajib pajak adanya mengalami masalah. Masalah yang terkait yaitu adanya objek pajak maupun subyek pajak yang tidak diketahui keberadaan nya oleh pihak RT, adanya pergantian kepemilikan tanah atau bangunan subyek pajak tersebut sehingga RT mengalami masalah dalam menyampaikan SPPT PBB P2. SPPT PBB P2 yang tidak diketahui objek pajak maupun subyek pajaknya akan dikembalikan ke Kabupaten Kubu Raya. Dari pihak RT harus memberikan informasi ke Kabupaten seperti adanya pergantian kepemilikan tanah dan bangunan, maka RT harus memberikan informasi alamat terbaru subyek pajak dan menjelaskan kependudukannya. Setelah melakukan perbaikan data atau pendataan ulang kembali, maka sebaiknya pihak Kabupaten atau Dispenda agar turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan masalah tersebut supaya dapat menyelesaikan masalah penyampaian SPPT PBB P2 ke wajib pajak dan tidak akan mengalami masalah lagi ditahun berikutnya.
5. Kendala atau penyebab penghambatnya BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB-P2, adanya objek pajak yang kosong, dan jauhnya jangkauan tempat wajib pajak. Dan upaya BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 adalah melakukan pendataan ulang kembali dan melakukan penggalakkan pemungutan PBB-P2.

**Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh BPPRD perlu memperhatikan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti pengadaan belanja modal berupa computer/jaringan, baik berupa *hardware* maupun *software*, dalam meningkatkan kualitas data dan informasi wajib pajak yang akurat dan tepat.
2. Pentingnya meningkatkan sistem pengendalian internal karena dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat menantang pegawai untuk bekerja dengan lebih baik agar informasi dan kenyataan di lapangan relevan, sehingga target wajib pajak tepat sasaran dan masalah yang sama tidak terulang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel dependen pada penelian serta menambah metode pengumpulan data, dengan cara survey lapangan dan wawancara secara langsud dalam pengisian kuesioner guna mendapatkan informasi lebih selain yang telah ada di dalam kuesioner yang telah di bagikan.

**Daftar Pustaka**

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Baridwan, Zaki. (2002). *Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode).* Edisi Kelima, cetakan kedelapan. Yogyakarta: Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada.

Bodnar, George H. Dan Hopwood, William S. Diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf dan Andi M. Tambunan, (2008). *Sistem Informasi Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.

Derlina, Sutria, Tunas. 2013. Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul &Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik. Teori, konsep dan aplikasi.* Jakarta: Salemba Empat.

Hermansyah, Andi Abdillah. 2015. Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makassar. Makassar.

Indrajani. (2011). *Pengantar dan Sistem Basis Data.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Jogiyanto. (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis.* Yogyakarta: ANDI.

Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi edisi ketiga.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.

Mariastuti, Dwi Yulianti. 2012. Pengaruh Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung). Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.

Munir, H. Dasril dkk. (2004). *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

Muyassaroh, Etty. (2012). *Perpajakan Brevet A dan B.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Saputra, Rudi. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Surabaya.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 3.* Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.

Suryani, Evi. 2016. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dam Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lampung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi.* Bandung: Lingga Jaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.